

## **Hasil Kongres Korban Pelanggaran HAM berat Masa Lalu (1974-1999) Timor Leste**

Sepanjang tiga hari para korban pelanggaran HAM masa lalu telah melakukan kongres pada tanggal 2-4 September 2009, bertempat San Paulo, Commorro, Dilli. Kongres ini dihadiri korban dan keluarga korban dari 13 distrik, dari seluruh wilayah Timor Leste. peserta kongres berjumlah 122 orang. Para peserta merupakan perwakilan para korban dari tiap distrik, yang telah dipilih pada saat kegiatan pra kongres diadakan di 13 distrik pada Mei- Agustus

Penyelenggaraan Kongres dilatarbelakangi oleh keresahan dan kekecewaan para korban maupun kelompok masyarakat sipil terhadap sikap politik pemerintah terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Menjelang sepuluh tahun kemerdekaan pemerintah tidak juga membuat kebijakan dan tindakan yang berpihak kepada para korban, khususnya bagi para korban yang berasal dari masyarakat sipil, pemerintah cenderung hanya memperhatikan mereka yang dikategorikan sebagai pahlawan. Kondisi ini tidak terlepas dari politik impunitas yang diterapkan pemerintah dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Melalui politik impunitas, pemerintah tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi korban tetapi juga menutup jalan keadilan bagi para korban. Selain itu Kongres juga dilatarbelakangi oleh kesadaran para korban untuk membangun gerakan korban yang terkonsolidasi dengan baik, mengingat selama ini korban masih terpisah-pisah dalam kelompok kecil yang terpecah dan terbagi-bagi, sehingga pemerintah tidak pernah menganggap penting para korban.

Selama tiga hari proses kongres, melalui seminar, sidang komisi dan sidang pleno, para peserta telah menghasilkan beberapa keputusan dan agenda yang berkaitan dengan penguatan organisasi korban dan agenda advokasi yang akan dilakukan untuk perjuangan pemenuhan hak-hak korban, hasil tersebut adalah:

1. Pembentukan organisasi Nasional Korban yang bernama **“Assosiasun Nasional Vitima & Familia Martires da Patria (1974-1999)”**. Nama ini hasil seleksi dari 18 nama lain yang diusulkan peserta baik dalam sidang komisi maupun sidang pleno. Organisasi ini beranggotakan korban dari 13 distrik, dengan tujuan memfasilitasi perjuangan pemenuhan hak-hak korban. Dalam kerjanya organisasi ini berdasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, non kekerasan, demokrasi, solidaritas, persatuan, perdamaian, pertanggungjaawaban, ketulusan, transparansi, non partisan dan berkelanjutan
2. Adanya Agenda atau program advokasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah/Negara bagi pemenuhan hak-hak korban yang berkenaan dengan keadilan dan pemulihan (reparasi).

Untuk Agenda keadilan yang akan dilakukan adalah:

- Mendorong dan menekan Parlemen, Partai Politik dan semua institusi terkait untuk mendukung upaya-upaya pemenuhan hak korban
- Menggalang dukungan/solidaritas nasional dan internasional (NGO, Organisasi korban, mahasiswa dll) untuk menolak politik impunitas pemerintah

- Melakukan upaya-upaya penolakan rekonsiliasi sepihak antara pemerintahan Timor Leste dan Indonesia
- Melakukan kampanye penolakan politik impunitas pemerintah melalui berbagai macam kegiatan; pembuatan petisi, protes terbuka, program radio, pendokumentasian
- Membangun konsolidasi korban yang kuat dan berkesinambungan melalui pertemuan-pertemuan regular
- Membangun inisiatif mandiri di tingkat lokal melalui peace center di desa-desa

Untuk reparasi (pemulihan) yang akan dilakukan:

- Mendorong lahirnya kebijakan (UU) dan tindakan (implementasi) pemerintah dan dunia internasional untuk upaya pemulihan korban dalam bentuk akses kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pendampingan psikologi.
- Mendorong dan mengupayakan reparasi (pemulihan) yang berbasis akar rumput
- Mendorong adanya memorialisasi di tempat-tempat persitiwa pembunuhan massal
- Mendorong adanya pengakuan tentang terjadinya kejahatan Kemanusiaan di Timor Leste dan penghargaan terhadap para Korban dan keluarga korban
- Mengupayakan secara mandiri upaya-upaya pemulihan melalui akses-akses yang tersedia baik di institusi pemerintah maupun dari komunitas nasional dan internasional
- Melakukan pendekatan social kultural dengan para korban belum siap membuka diri
- Mengupayakan secara mandiri untuk membuka akses-akses pemulihan korban

3. Terpilihnya pengurus Organisasi yang mewakili dari 13 distrik:

Distrik Los Palos	: Albina Marcal Freitas
Distrik Aileu	: Paulino de Jesus Arajuo
Distrik Liquica	: Elisa dos Santos
Distrik Ainaro	: Clara Pedro Fernandes
Distrik Manufahi	: Flaviano Pereira Lopes
Distrik Suai	: Hermenegildo Ximenes
Distrik Oecuse	: Ciprino da Cunha
Distrik Manatuto	: Eugenia Neves da Costa
Distrik Viqueque	: Moises Correia da Silva Marques
Distrik Bobonaro	: Marciana Gouveia Leite
Distrik Ermera	: Ines Salsinha Trindade
Distrik Baucau	: Augusto Pires

Hasil kongres ini adalah aspirasi demokratis yang dilakukan korban secara langsung dan Kongres ini adalah Kongres Nasional Pertama yang dilakukan para korban, sebagai salahsatu tekad dan perjuangan untuk melawan Impunitas!

Dili

4 September 2009